

BIROKRASI PROGRAM USAHA EKONOMI DESA

Arlis dan Mayarni

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Bureaucracy Program Rural Economic Enterprises. The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence the bureaucracy UED program - SP Village Bayur Island District Cerenti Singingi Kuantan District. Population and sample in this study was the managing UED, the verification team, the audit team and the facilitators and the community of users. Data was collected through questionnaire dissemination techniques, interviews and observations, once the data is collected and then analyzed using qualitative and quantitative descriptive analysis. Results showed bureaucracy UED program - SP Village Bayur Island District Cerenti Kuantan District Singingi still runs poorly. The dominant factor influencing bureaucratic UED-SP program performing its duties is the fear factor.

Abstrak: Birokrasi Program Usaha Ekonomi Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pengelola UED, tim verifikasi, tim audit dan fasilitator serta masyarakat pemanfaat. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik penyebaran angket, wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan dengan kurang baik. Faktor yang dominan mempengaruhi birokrasi program UED–SP melaksanakan tugasnya adalah faktor ketakutan.

Kata Kunci: Birokrasi, implementasi kebijakan, dan Program UED - SP.

PENDAHULUAN

Langkah strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dengan membangun ekonomi lokal masyarakat, sehingga masyarakat nantinya dapat berdaya dengan kekuatan perekonomian yang ada di daerahnya. Sebab pembangunan ekonomi lokal mengarah kepada : *Pertama*, usaha untuk penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah, *Kedua*, proses dimana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat dalam mendorong, merangsang atau memelihara aktivitas usaha dan atau penciptaan lapangan kerja. *Ketiga*, sebagai solusi dalam pemulihan dan pengembangan perekonomian nasional, terutama dalam pendayagunaan potensi ekonomi di masing-masing daerah dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakatnya masing-masing (Riyadi, 2005).

Filosofi lahirnya Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED – SP) dikarenakan adanya keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa yang dikem-

bangkan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat. Sehingga dengan pengembangan ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat, diharapkan masyarakat mampu melaksanakan program dengan baik dan mengeluarkan masyarakat miskin desa dari kemiskinannya. Program UED – SP merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten, dimana untuk Kabupaten Kuantan Singingi program UED – SP berdasarkan Keputusan Bupati No. 44 Tahun 2008 tentang penetapan lokasi dan alokasi dana Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa (PPLED) Kabupaten Kuangan Singingi.

Implementasi program UED – SP adalah rumah tangga miskin yang ada di setiap desa, sehingga dengan adanya bantuan modal sosial ini setiap masyarakat desa dapat berdaya dan mengembangkan ekonominya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah rumah tangga miskin di masing-masing kecamatan masih relatif

tinggi. Terlihat bahwa jumlah rumah tangga miskin terbesar ada di Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Tengah, sedangkan untuk rumah tangga miskin yang terendah berada di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Hulu Kuantan. Hal ini menerangkan bahwa Kecamatan Benai dan Kecamatan Kuantan Tengah memiliki rumah tangga miskin terbesar, juga disebabkan oleh luas wilayah yang lebar dan pemerintahan desa yang banyak pula. Sedangkan bagi Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Hulu Kuantan yang memiliki luas wilayah yang kecil dan pemerintahan desa yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki rumah tangga miskin yang cukup banyak. Selain itu juga ada beberapa kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga miskin yang tergolong sedang, seperti Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Inuman. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian yang lebih dalam upaya memberdayakan rumah tangga miskin yang memiliki untuk terlepas dari lingkaran kemiskinan.

Program UED – SP di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa. Salah satu desa yang mendapat program UED – SP di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti. Pemilihan Desa Pulau Bayur dilakukan karena desa ini merupakan salah satu desa yang terluas di wilayah Kecamatan Cerenti dan merupakan salah satu desa yang selalu memperoleh program UED – SP dari mulai awal program ini digulirkan. Implementasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti sudah berjalan kurang lebih 4 tahun.

Namun pelaksanaan program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil dapat mengembalikan pinjaman tapi usaha mereka tidak berkembang. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil tidak dapat mencicil modal usaha atau kredit

macet. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil masih menggunakan dana pinjaman untuk membeli peralatan rumah tangga atau konsumsi, daripada untuk mengembangkan usaha yang digelutinya. Pemanfaat atau pelaku usaha kecil masih ada yang tidak mau membayar pinjaman, karena ada ditemukan oknum perangkat desa dan orang yang lebih mampu tidak membayar angsuran pinjamannya.

Birokratisasi dapat menjadi kekuatan yang baik untuk pertumbuhan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang efisien, tetapi juga dapat menjadi alat yang menghambat perubahan-perubahan. Dalam hal ini sikap birokrasi adalah memperkembangkan standart dan prosedur tata kerja dan memperinci kewenangan secara detail, kemudian dijadikan sesuatu yang rutin dan dilaksanakan secara ketat. Dilain pihak birokrasi dapat dijadikan alat pembaharuan. Hal ini terlaksana jika tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembangunan.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia. Sedangkan menurut Grindle (1980) implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dan suatu kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode penelitian survei sebagai salah satu jenis *scientific research* (penelitian ilmiah), terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang kondisi variabel penelitian baik variabel yang berpengaruh maupun variabel yang dipengaruhi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode *survei eksplanatori* adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan evaluasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana di masa yang akan datang. Dengan survei eksplanatori diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program UED – SP dilaksanakan dikarenakan adanya keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa yang dikembangkan berdasarkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat. Sehingga dengan pengembangan ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat, diharapkan masyarakat mampu melaksanakan program dengan baik dan mengeluarkan masyarakat miskin desa dari kemiskinannya. Implementasi program UED – SP adalah rumah tangga miskin yang ada di setiap desa, sehingga dengan adanya bantuan modal sosial ini setiap masyarakat desa dapat berdaya dan mengembangkan ekonominya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga program ini memiliki tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa.

1. Faktor *Fear*

Rasa takut merupakan hal yang wajar dimiliki oleh setiap individu dalam melaksanakan

setiap aktivitas atau kegiatannya. Sebab rasa takut akan menggiring individu untuk tidak melakukan suatu tindakan atau aktivitas yang membuat dirinya menjadi takut. Dalam program pemberdayaan masyarakat, rasa takut sering menghampiri masyarakat yang disebabkan oleh adanya keinginan orang lain untuk memaksa atau menganjurkan mereka mengikuti suatu program yang telah ditetapkan. Ketakutan yang berlebihan dari masyarakat terhadap suatu program membuat birokrasi yang melaksanakan program menjadi kesulitan untuk menjalin komunikasi dalam upaya pelaksanaan program. Karena dengan rasa takut yang tinggi dari calon penerima program membuat pelaksana program menemui kesulitan untuk bisa memberikan informasi dan penjelasan terhadap pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan program UED – SP, birokrasi pelaksana juga menemui kesulitan dalam menghilangkan rasa takut yang dimiliki oleh masyarakat desa agar memiliki keinginan untuk mengikuti program. Dampak informasi yang ingin disampaikan dalam program ini sulit disampaikan. Birokrasi telah melakukan berbagai bentuk pertemuan dan himbuan dalam upaya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tujuan, sasaran dan manfaat program UED – SP. Namun dikarenakan rasa takut yang tinggi untuk ikut serta dalam pelaksanaan program membuat masyarakat tidak mepedulikan keberadaan program.

Masyarakat memang memiliki rasa takut yang cukup beralasan, sehingga tidak peduli terhadap program UED – SP yang dilaksanakan. Artinya masyarakat memang memiliki rasa takut yang tinggi untuk berperan serta terhadap program UED – SP yang ditawarkan. Walaupun program ini menjanjikan tujuan yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi masyarakat. Namun tidak semua masyarakat tertarik untuk mengikuti program dan berperan serta dalam program tersebut. Rasa takut yang paling dominan menghantui masyarakat dalam mengikuti program UED – SP adalah kegagalan dalam mengikutinya. Sebab gagal dalam melaksanakan program yang diikuti akan membuat masyarakat terbebani dengan

hutang yang dibuatnya dengan menerima modal dari program yang diikuti. Karena rasa takut akan gagal sudah muncul didalam diri masyarakat di saat mereka mengikuti program harus menyusun sebuah proposal pengajuan permohonan modal sesuai dengan syarat dan kriteria program yang ditetapkan. Dimana tidak semua masyarakat bisa menyusun sebuah proposal permohonan dalam upaya mengikuti program yang dilaksanakan. Oleh karenanya masyarakat memiliki rasa takut yang tinggi untuk gagal dalam mengikuti program yang ditetapkan.

Apabila kegagalan benar-benar terjadi, maka rasa takut yang berikutnya akan muncul adalah takut menerima sanksi, akibat dari kegagalan yang dilakukan. Sebab sanksi yang diterima bukan hanya sanksi finansial tetapi juga sanksi psikologis dari masyarakat yang gagal mengikuti program. Efek dari sanksi psikologis ini akan membuat masyarakat semakin tertekan menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat dan tentunya juga masih terbelit dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu juga rendahnya dukungan yang diberikan oleh elit desa dan lingkungan membuat masyarakat sering menjadi takut untuk mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu birokrasi pelaksana program harus mampu memberikan kepercayaan dan pencerahan kepada masyarakat untuk bisa menghilangkan rasa takut dalam mengikuti program. Tentunya dengan cara berkomunikasi dengan baik dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam melaksanakan program sehingga terhindar dari kegagalan dalam mengikuti program.

2. Faktor *Role Clarity*

Ketidakyamanan merupakan rasa yang muncul didalam diri individu apabila sedang melakukan aktivitas dan kegiatan. Perasaan tidak nyaman akan timbul apabila individu mendapatkan paksaan dan tekanan dalam melaksanakan kegiatan. Paksaan dan tekanan yang muncul membuat individu sulit untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Akibatnya kegagalan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan akan menghantui masyarakat. Selain itu

juga ketidakyamanan akan muncul apabila setiap individu diharuskan melakukan sesuatu yang baru atau hal-hal yang belum pernah dilakukan. Sebab semuanya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri agar bisa melakukan kegiatan atau aktivitas yang baru. Ditambah lagi masyarakat akan sangat kesulitan apabila harus mengerjakan sesuatu yang baru tanpa ada bimbingan dan pengalaman sebelum dalam kegiatan tersebut.

Dalam program UED – SP, birokrasi harus bisa mengatasi rasa tidak nyaman yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengikuti program tersebut. Walaupun proses tersebut dilakukan dengan cukup sulit, karena harus menanamkan kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti program UED – SP. Karena terkadang kriteria program UED – SP yang harus diikuti memang mewajibkan masyarakat untuk bisa mengikuti dan mengeluti pekerjaan atau aktivitas yang baru. Tantangan ini tentunya mengharuskan birokrasi memberikan pengertian, penjelasan dan pemahaman akan pelaksanaan program UED – SP.

Masyarakat desa merasa sangat kurang nyaman dengan penetapan kriteria usaha yang akan menerima bantuan modal dari program UED – SP. Sebab ternyata tidak semua masyarakat menggeluti usaha ekonominya yang sesuai dengan kriteria usaha yang sudah ditetapkan oleh birokrasi pelaksana program UED – SP. Fakta ini membuktikan bahwa pihak pengelola program UED – SP telah menetapkan terlebih dahulu kriteria usaha yang akan diberikan bantuan modal. Sehingga masyarakat harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan modal itu, apabila tidak mengikuti kriteria usaha yang ditetapkan maka masyarakat tidak akan mendapatkan modal usaha yang diberikan melalui program UED – SP. Kondisi ini membuat banyak masyarakat yang kurang bisa mengikuti program UED – SP, karena tidak sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditetapkan. Realita ini membuktikan bahwa pihak pengelola kurang mengenali dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, bisa saja disebabkan oleh kurangnya observasi dan

pencarian data dari pengelola program UED – SP. Akibat dari ketidakmampuan pengelola program UED – SP dalam mengenali keinginan masyarakat berdampak kepada ketidaknyamanan masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan.

Kemudian ketidaknyamanan juga dirasakan masyarakat apabila mereka harus melakoni pekerjaan yang baru dengan merubah pekerjaan yang lama, hanya karena ingin memperoleh program saja. Ada beberapa masyarakat yang menerima program UED – SP harus melakoni pekerjaan yang baru dan umumnya mengalami kegagalan dalam melaksanakan usaha yang telah ditetapkan. Sebab masyarakat merasa tidak nyaman harus mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi kebiasaannya dalam memenuhi kebutuhan pendapatan dari keluarganya. Keadaan inilah yang membuat akhirnya program UED – SP yang diikuti gagal dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa dalam pengentasan kemiskinan.

3. Faktor *Resistance of Change*

Kecenderungan menggunakan metode yang sama dalam melaksanakan program pemerintah di setiap wilayah sering terjadi. Sebab pemerintah memiliki kecenderungan untuk menguniversalkan bahwa setiap kegiatan program pemerintah dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Tanpa memperhitungkan faktor karakteristik masyarakat, geografis, ekonomi lokal, budaya dan sebagainya. Dampaknya ada beberapa program pemerintah yang sukses dilaksanakan pada suatu wilayah tetapi mengalami kegagalan di beberapa wilayah lainnya. Kondisi ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menetapkan program-program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di wilayah yang berbeda-beda.

Dalam program UED – SP, kecenderungan birokrasi pelaksana menggunakan metode dan pola yang sama sering dilakukan. Apalagi pelaksanaan program UED – SP yang dilaksanakan di satu Kabupaten, umumnya memiliki metode dan pola yang sama untuk melak-

sanakannya. Bahkan terkadang persyaratan dan kriteria yang ditetapkan juga sama untuk setiap desa yang menerima program UED – SP.

Birokrasi pelaksana program UED – SP memang cenderung menggunakan metode dan tehnik yang sama untuk melaksanakan program. Bahkan diseluruh wilayah desa yang menerima program UED – SP di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kriteria dan persyaratan yang sama. Fakta ini menjelaskan bahwa pihak pengelola program UED – SP memang kurang melakukan observasi dan pengumpulan data guna mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi lokalnya. Dampaknya masih banyak kriteria usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa belum terakomodir untuk bisa menerima bantuan modal melalui program UED – SP. Sehingga masyarakat desa yang seharusnya layak menerima bantuan modal dalam mengembangkan ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan dikarenakan persyaratan dan kriteria yang tidak terpenuhi. Apalagi kecenderungan yang lain adalah setiap masyarakat desa atau kelompok yang ingin melakukan pinjaman modal harus menyusun sebuah proposal pengajuan yang nanti akan diseleksi dan diverifikasi oleh pihak pengelola serta diputuskan layak atau tidak layak dibantu.

Kondisi ini tentunya akan memberikan kesempatan yang kecil bagi masyarakat desa yang miskin untuk bisa menerima bantuan modal. Sebab sudah bisa dipastikan masyarakat desa yang miskin tidak akan pernah bisa menyusun proposal pengajuan tanpa ada yang memfasilitasinya atau bahkan kecenderungannya hanya masyarakat desa yang mampu saja bisa menyusun proposal pengajuan dan mengarah kepada tidak tepat sasaran. Realita inilah yang membuat akhirnya program UED – SP yang menyediakan bantuan modal ± Rp. 30.000.000,- hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dan tidak menyentuh masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Oleh karenanya dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program yang masih jauh menyentuh keberhasilan pelaksanaan dibutuhkan

keseriusan dan komitmen birokrasi pelaksana untuk merubah sistem, metode dan tehnik pelaksanaan di setiap wilayah. Dimana dalam melakukan perubahan tentunya harus menyesuaikan beberapa hal dalam pelaksanaan program, seperti karakteristik masyarakat desa, kondisi geografi, sosial ekonomi, budaya dan sebagainya.

SIMPULAN

Birokrasi program UED – SP di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan dengan kurang baik. Dimana dari hasil analisis yang dilakukan ada tiga indikator yang masih berjalan dengan kurang baik, yaitu pemberian wewenang dan tanggung jawab, keahlian aparatur dan komunikasi. Fakta ini menjelaskan bahwa birokrasi program UED – SP belum dapat melaksanakan program dengan sebaiknya, sebab masih belum mampu untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap anggotanya dalam pelaksanaan program. Akibatnya dalam pelaksanaan program UED – SP setiap anggota hanya menunggu instruksi dan perintah kerja dari ketua saja, tanpa memiliki inisiatif dan inovatif kerja. Selain itu juga keahlian yang dimiliki oleh aparatur- aparatur pelaksana program UED – SP masih rendah, sehingga sangat menyulitkan anggota pelaksana program untuk bisa mengimplementasikan program dengan benar.

Realita lainnya yang ditemukan adalah komunikasi program yang kurang berjalan, dimana tidak semua masyarakat desa yang menerima informasi adanya tentang adanya

pelaksanaan program UED – SP. Dampaknya hanya segelintir masyarakat saja yang mengetahui adanya program dan bisa memanfaatkan program, serta program hanya terfokus kepada masyarakat yang mengetahui informasi dan yang dekat dengan informasi. Faktor yang dominan mempengaruhi birokrasi program UED – SP melaksanakan tugasnya adalah faktor ketakutan (*fear*). Dimana ketidakmampuan masyarakat desa untuk mengikuti program UED – SP yang memberikan bantuan modal usaha disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dari masyarakat desa. Rasa takut yang ditimbulkan meliputi ketakutan akan kegagalan dalam mengikuti program, dimana dengan perasaan takut gagal membuat masyarakat tidak akan berkonsentrasi mengerjakan pengembangan ekonominya.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrow Martin. 1998. *Birokrasi*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Bintoro. 1992. *Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Otonomi*. Philosophy Press, Yogyakarta.
- Dunn N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Hassel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung & Co, Yogyakarta.
- Riyadi dan Deddy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi; dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.